

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, UMUR PEMERINTAH  
DAERAH, STATUS PEMERINTAH DAERAH, JUMLAH PENDUDUK,  
JUMLAH SKPD, BELANJA PEGAWAI DAN *LEVERAGE* TERHADAP  
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH**

*(Studi Empiris Pada Kabupaten /Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2019)*

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

**INUL ROFIQ**

**2016/16043092**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2021**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status  
Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai Dan  
*Leverage* Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

*(Studi Empiris Pada Kabupaten /Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2019)*

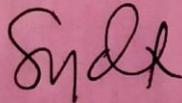
Nama : Inul Rofiq  
NIM / TM : 16043092 / 2016  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2021

Disetujui Oleh:

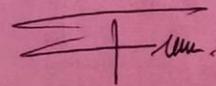
Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi



Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D  
NIP. 19800103 200212 2 001

Dosen Pembimbing,



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak  
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

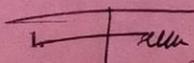
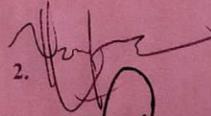
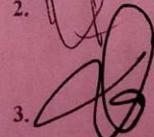
Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang

Judul : Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur  
Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah,  
Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai  
Dan *Leverage* Terhadap Kemandirian Keuangan  
Daerah (*Studi Empiris Pada Kabupaten /Kota di  
Sumatera Barat Tahun 2015-2019*)

Nama : Inul Rofiq  
NIM / TM : 16043092 / 2016  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2021

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	TandaTangan
1.	Ketua	Fefri Indra Arza, SE., M.Sc., Ak	1. 
2.	Anggota	Halkadri Fitra, SE., MM., Ak., CA	2. 
3.	Anggota	Dr. Deviani, SE., M.Si., Ak	3. 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Inul Rofiq  
NIM/Tahun Masuk : 16043092/2016  
Tempat/Tgl. Lahir : Pariaman/ 06 Oktober 1998  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Pasar Ulakan  
No. Hp/Telp : 081311780808  
Judul Skripsi :Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai Dan Leverage Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten /Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2019)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/ skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/ skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/ skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/ skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji, dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh- sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/ skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, September 2021

Inul Rofiq  
Nim:16043092/2016

## ABSTRAK

**Inul Rofiq (16043092)**

**:Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai dan *Leverage* Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (*Studi Empiris Pada Kabupaten /Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2019*).**

**Dosen Pembimbing**

**: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai dan *Leverage* terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode Total Sampling dengan jumlah sampel 19 Kabupaten/ Kota dengan jangka waktu 5 tahun. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk dan *Leverage* berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Jumlah SKPD dan Belanja Pegawai tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

**Kata Kunci: Belanja Pegawai, Kemandirian Keuangan Daerah ,Leverage, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD.**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai Dan Leverage Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten /Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2019)”. Skripsi ini dikerjakan demi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Akuntansi S-1 Keahlian Akuntansi Sektor Publik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena adalah sesuatu yang tidak terbatas. terselesainya Skripsi ini tentunya tidak lepas dari dorongan dan uluran tangan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. ALLAH Azza Wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya dan segala kekuatan, petunjuk serta kemudahan untuk semuanya. Serta kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tauladan dan telah membawa perubahan pada umat muslim.
2. Bapak Prof. Ganefri, Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang yang telah menjadi pemimpin di institusi ini.
3. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah menyediakan fasilitas kuliah dan izin dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Ibu Sany Dwita SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi S-1 dan ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan

bantuan administrasi dan membantu kemudahan dalam penelitian dan penulisan Skripsi ini.

5. Ibu Sany Dwita SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademik dan sudah penulis anggap sebagai orang tua angkat di jurusan Akuntansi S-1 yang selalu memberikan pencerahan kepada penulis.
6. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu, pengarahan, perhatian, masukan serta waktu kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM, Ak, CA selaku Dosen penguji I yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Skripsi ini
8. Ibu Dr. Deviani, SE, Ak, M.Si selaku Dosen penguji II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen Dosen serta Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis melakukan perkuliahan.
10. Teristimewa penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Alm. Syamsudin yang telah dipanggil oleh Allah S.W.T disaat penulis sedang berjuang mengerjakan skripsi ini dan Ibunda Yendri atas cinta yang tak pernah habisnya serta memberikan kesungguhan do'a, bantuan moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
11. Sahabat terbaik yang pernah penulis miliki yakni Haris Fadilah, Alya Rizky, Restu Hanin Annisa, Syofyan Yuliantoni, Nanda Rafsanjani, Danil Sanjaya, Hikmah Fuji Astuti, Elmiza Dan Fitri Herdi yang membantu penulis menenangkan diri serta memberikan motivasi yang tidak henti-hentinya kepada penulis.
12. Partner tersabar Alan Sepriadi, Wahyu Ramadhan, Sri Wahyuni dan Bang Rizki Anshari yang selalu berusaha untuk membantu serta memberikan dukungan kepada penulis agar nyaman dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman- temanku yang selalu tertawa didalam harinya yaitu Ajo Rega, Iqbal Kocok, Zam Kiting dan Uniang Cimen serta untuk teman- teman Kelas D Akuntansi 2016 Iksan, Zam, Iqbal, Uniang, Wahyu, Rahmat, Irphan, Reza, Rizki, Rega, Ranti, Ami, Vivi, Mega, Nike, Putri.R, Putri.Z, Rani, Risty, Vee, Dila, Resti, Linia, Reza.P dan Iput. yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan ktirik yang konstruktif dari semua pihak diharapkan dei penyempurnaan selanjutnya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, Amiin

**Padang, September 2021**

**Inul Rofiq**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS</b> .....	<b>10</b>
<b>A. Kajian Teori</b> .....	<b>10</b>
1. Teori Keagenan (Agency Teory).....	10
2. Kemandirian keuangan daerah.....	12
3. Ukuran Pemerintah Daerah.....	15
4. Umur Pemerintah Daerah.....	15
5. Status Pemerintah Daerah.....	16
6. Jumlah Penduduk.....	18
7. Jumlah SKPD.....	19
8. Belanja Pegawai.....	20
9. Leverage.....	20
<b>B. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>21</b>
<b>C. Hubungan Antar Variabel</b> .....	<b>23</b>
<b>D. Kerangka Konseptual</b> .....	<b>30</b>
<b>E. Hipotesis Penelitian</b> .....	<b>30</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
<b>A. Desain Penelitian</b> .....	<b>32</b>
<b>B. Populasi dan Sampel</b> .....	<b>32</b>
<b>C. Jenis Penelitian</b> .....	<b>33</b>

<b>D. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>33</b>
<b>E. Variabel Penelitian.....</b>	<b>34</b>
1. Variabel Dependen .....	34
2. Variabel Independen.....	34
<b>F. Teknik Analisis Data.....</b>	<b>37</b>
1. Analisis Deskriptif.....	37
2. Uji Asumsi Klasik .....	38
3. Uji Hipotesis.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
<b>A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....</b>	<b>43</b>
<b>B. Deskripsi Variabel Penelitian .....</b>	<b>45</b>
<b>C. Analisis Data.....</b>	<b>62</b>
1. Statistik Deskriptif.....	62
2. Uji Asumsi Klasik .....	65
3. Uji Hipotesis.....	69
<b>D. Pembahasan Hasil Penelitian.....</b>	<b>78</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>88</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>88</b>
<b>B. Keterbatasan Penelitian .....</b>	<b>89</b>
<b>C. Saran .....</b>	<b>89</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel1.1 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat	
Pada Tahun 2015 sampai tahun 2019 .....	4
Tabel 2.1 Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah .....	14
Tabel 4.1 Nama Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.....	44
Tabel 4.2 Prosedur Penentuan Data .....	45
Tabel 4.3 Kemandirian Keuangan Daerah (Dalam Persentase).....	47
Tabel 4.4 Ukuran Pemerintah Daerah (Log Total Aset).....	49
Tabel 4.5 Umur Pemerintah Daerah (Dalam Tahun).....	51
Tabel 4.6 Status Pemerintah Daerah .....	53
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk (Dalam Jiwa) .....	55
Tabel 4.8 JUmlah SKPD (Total SKPD).....	57
Tabel 4.9 Belanja Pegawai (Dalam Persentase).....	59
Tabel 4.10 Leverage (Dalam Persentase).....	61
Tabel 4.11 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	62
Tabel 4.12 Uji Normalitas KS-Smirnov .....	66
Tabel4.13 Uji Multikolinearitas .....	67
Tabel4.14 Uji Heterokedastisitas .....	68
Tabel4.15 Uji Autokorelasi .....	69
Tabel4.16 Uji Regresi Linier Berganda .....	70
Tabel4.17 Uji Simultan ( Uji Statistik F).....	73
Tabel4.18 Uji Koefisien Determinasi (R2).....	74
Tabel4.19 Uji t (Parsial).....	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar2.1 Kerangka Konseptual .....	30
-------------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran1. Data Kemandirian Keuangan Daerah .....	94
Lampiran2. Ukuran Pemerintah Daerah .....	98
Lampiran3. Umur Pemerintah Daerah .....	101
Lampiran4. Status Pemerintah Daerah.....	104
Lampiran5. Jumlah Penduduk.....	107
Lampiran6. Jumlah SKPD .....	110
Lampiran7. Belanja Pegawai .....	113
Lampiran8. Leverage .....	116
Lampiran9. Tabulasi Data.....	119
Lampiran10. Data Outlier .....	123
Lampiran11. Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	124
Lampiran12. Hasil Uji Normalitas.....	124
Lampiran13. Hasil Uji Multikolinieritas.....	125
Lampiran14. Hasil Uji Heterokedastisitas .....	125
Lampiran15. Hasil Uji Autokorelasi.....	125
Lampiran16. Hasil Uji Statistik F .....	126
Lampiran17. Hasil Uji Koefisien Adjusted R Square.....	126
Lampiran18. Hasil Uji T (Parsial).....	126

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai otonomi daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mana pemerintah daerah diberikan hak dan wewenang oleh pemerintah pusat dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya secara mandiri. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan pemerintah daerah mampu dalam mengelola potensi sumber pendapatan keuangan daerahnya untuk memperbaiki keadaan finansial dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakatnya guna terealisasikannya otonomi daerah tanpa campur tangan dari pemerintah pusat.

Menurut Utami, B. (2018) tujuan otonomi daerah adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari Otonomi Daerah yaitu untuk meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing pemerintah daerah guna tercapainya kesejahteraan dan kemandirian pada pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan bisa memanfaatkan segala sumber-sumber pendapatan yang terdapat pada daerahnya dengan semaksimal mungkin.

Implikasi dari pemberian kewenangan otonomi daerah ialah guna menuntut pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah, terutama pembangunan sarana dan prasarana umum. Pembangunan tersebut dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah baik dari sisi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya. Pembangunan ini diharapkan memberikan manfaat bagi daerah diantaranya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, mendorong perkembangan perekonomian daerah, mendorong peningkatan pembangunan daerah disegala bidang, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan mendorong kegiatan investasi Mukarramah, H. (2017).

Menurut Halim, A. (2007) ciri utama suatu daerah yang dapat melaksanakan otonomi yaitu kemampuan keuangan daerah. Daerah otonom memiliki kewenangan untuk dapat menggali sumber keuangan yang ada pada daerahnya, mengelola dengan menggunakan keuangannya sendiri dalam membiayai kegiatan pemerintahan. Pendapat asli daerah harus menjadi sumber utama dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintah daerah sehingga dapat mengurangi ketergantungan akan bantuan dari pemerintah pusat. Sistem otonomi daerah pemerintah daerah mempunyai keleluasaan pengambilan keputusan dalam upaya pembangunan dan mengembangkan seluruh potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat.

Namun, realita menunjukkan bahwa belum sepenuhnya pemerintah daerah di Indonesia berhasil mencapai tingkat kemandirian yang diharapkan. Masih banyak pemerintah Kabupaten/ Kota di daerah yang sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Salah satu pemerintah daerah yang masih menerima dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam porsi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya adalah pemerintah Kabupaten/ Kota

di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Dalam rincian penerimaan dana perimbangan Provinsi di Indonesia dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2019, Provinsi Sumatera Barat masuk dalam daerah 10 besar penerima dana perimbangan terbesar pada tahun 2019 yakni berupa Dana Alokasi Umum (DAU) ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dikutip dari [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) pada tahun 2019 bahwa Sumatera Barat masuk dalam 10 provinsi dengan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) terbesar dengan nilai sebesar Rp 13,9 triliun. Hal ini mencerminkan masih besarnya ketergantungan pemerintah Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat terhadap anggaran dana perimbangan dari pusat.

Halim, A. (2013) menyatakan bahwa salah satu instrument untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisa rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan disahkan. Penggunaan analisis rasio sebagai alat analisis keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dengan cara membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan pendapatan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat atau dari pinjaman Halim, A. (2007). Transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di

Indonesia dikenal sebagai dana perimbangan. Berikut ini adalah perhitungan analisis rasio kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2015 sampai tahun 2019:

**Tabel 1.1**  
**Tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 sampai tahun 2019**

NO	Kabupaten/Kota	% KKD				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kabupaten Agam	7.61	8.23	13.29	7.72	8.91
2	Kabupaten Dharmasraya	7.68	6.90	11.64	10.02	8.39
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	5.44	4.89	7.98	5.22	4.14
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	6.12	5.93	10.36	6.20	6.81
5	Kabupaten Padang Pariaman	6.51	5.69	11.33	6.90	7.21
6	Kabupaten Pasaman Barat	8.78	9.32	17.41	10.35	9.43
7	Kabupaten Pasaman	9.84	10.07	16.68	11.26	10.52
8	Kabupaten Pesisir Selatan	8.51	8.07	13.33	8.82	8.62
9	Kabupaten Sijunjung	8.52	9.51	12.43	9.17	9.18
10	Kabupaten Solok Selatan	5.90	7.05	10.48	8.25	8.02
11	Kabupaten Solok	5.32	5.50	9.93	6.24	6.32
12	Kabupaten Tanah Datar	10.78	11.12	16.43	10.49	10.22
13	Kota Bukittinggi	12.52	12.38	18.58	17.17	17.98
14	Kota Padang Panjang	15.30	14.67	17.69	16.82	15.43
15	Kota Padang	23.49	24.84	35.54	29.18	30.27
16	Kota Pariaman	5.44	5.01	5.08	5.41	5.93
17	Kota Payakumbuh	17.08	13.88	18.73	15.35	15.02
18	Kota Sawahlunto	10.77	9.97	11.96	8.76	98.47
19	Kota Solok	7.51	7.93	7.54	93.38	7.26
		183.12	180.96	266.41	286.71	288.13
		19	19	19	19	19
		<b>9.64</b>	<b>9.52</b>	<b>14.02</b>	<b>15.09</b>	<b>15.16</b>

Sumber: realisasi annual djpk kemenkeu

Berdasarkan tabel di atas mayoritas wilayah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat mempunyai tingkat kemandirian keuangan daerah di bawah 25%.

Tingkatan ini menunjukkan bahwa masih banyak Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki rasio kemandirian keuangan daerah dengan pola hubungan instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dalam pembiayaan dari pada pemerintah daerah (daerah belum maksimal dalam melaksanakan otonomi daerah). Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber potensial keuangan semaksimal mungkin khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah Taryoko, (2016)

Kemandirian keuangan pemerintah daerah tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, menurut Groves, S. M., W.M. Godsey, dan M.A. Shulman. (2001) faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan terdiri dari tiga kategori yaitu faktor lingkungan, faktor kesejahteraan, dan faktor finansial. Beberapa penelitian yang meneliti tentang hubungan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di dalam dan luar negeri. Ukuran, umur, status, jumlah penduduk, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), belanja pegawai dan *leverage* merupakan bagian dari faktor-faktor yang mempengaruhi keuangan.

Firmansyah, I. (2017) menyebutkan bahwa Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan pada daerah Provinsi Lampung. Pemerintah daerah dengan total aset yang besar akan mampu menjalankan pemerintahan daerahnya dengan baik dan dengan leluasa memanfaatkan nilai aset yang besar untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah. Pratiwi, N. (2016)

melakukan penelitian pada kabupaten/kota di Indonesia mengenai Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kemandirian finansial dan pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia. Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Kuncahyono, H. (2015) melakukan penelitian di daerah di Jawa Timur mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kemandirian keuangan pada pemerintah daerah. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa status pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah. Anwar, D. K. (2019) melakukan studi tentang determinan kemandirian keuangan daerah yang dilakukan pada Provinsi Jawa Timur. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa populasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap derajat kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian Pratiwi, N. (2016) mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kemandirian keuangan serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia. Diperoleh hasil penelitian bahwa jumlah SKPD berpengaruh positif yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Indonesia. Firmansyah, I. (2017) melakukan penelitian di provinsi Lampung mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keuangan daerah di provinsi Lampung. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa variabel *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Barat masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan masih tingginya ketergantungan akan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu menjadi fenomena dalam penelitian ini mengenai kemandirian keuangan pemerintah daerah tersebut meskipun pendapatan asli daerahnya meningkat. Dari beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan perbedaan dari hasil penelitian yang membuat peneliti tertarik memilih tema ini. Penelitian ini memiliki objek yang mencakup Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan menggunakan analisis data panel dalam periode lima tahun, yakni tahun 2015-2019. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini peneliti mengganti objek dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, pembaharuan tahun pada penelitian dan peneliti juga menambahkan dua variabel independent yaitu Jumlah Penduduk dan *Leverage*. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan kemandirian keuangan daerah diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai Dan *Leverage* Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kemandirian keuangan daerah?

2. Bagaimana pengaruh umur pemerintah daerah terhadap kemandirian keuangan daerah?
3. Bagaimana pengaruh status pemerintah daerah terhadap kemandirian keuangan daerah?
4. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap kemandirian keuangan daerah?
5. Bagaimana pengaruh jumlah SKPD terhadap kemandirian keuangan daerah?
6. Bagaimana pengaruh belanja pegawai terhadap kemandirian keuangan daerah?
7. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap kemandirian keuangan daerah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.
2. Mengetahui pengaruh umur pemerintah daerah terhadap terhadap kemandirian keuangan daerah.
3. Mengetahui pengaruh status pemerintah daerah terhadap terhadap kemandirian keuangan daerah.
4. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap terhadap kemandirian keuangan daerah.
5. Mengetahui pengaruh jumlah SKPD terhadap terhadap kemandirian keuangan daerah.
6. Mengetahui pengaruh belanja pegawai terhadap terhadap kemandirian keuangan daerah.

7. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap terhadap kemandirian keuangan daerah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai metode untuk melatih para intelektual dalam pemikiran ilmiah dan pemecahan masalah, dan membantu meningkatkan pemahaman tentang kemampuan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerahnya. Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap pemerintah daerah dapat mengeluarkan ide dan terobosan baru guna mewujudkan otonomi daerah pada pemerintahan daerahnya.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan sumbangan konseptual bagi penelitian selanjutnya yang meneliti mengenai topik yang sama.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori Keagenan merupakan salah satu teori yang digunakan dalam suatu penelitian, seperti ekonomika, akuntansi, pemasaran dan manajemen strategik. Dalam literatur akuntansi, teori ini menggambarkan suatu pola hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Dimana prinsipal sebagai orang yang memberikan amanah dan agen yang bertugas menjalankan amanah tersebut. Menurut Jensen, Meckling, dan Eisenhardt dalam buku Nahartyo, E., & Utami, I. (2019) mengatakan bahwa hubungan keagenan adalah suatu bentuk kontrak yang terjadi antara satu orang atau lebih. Dimana prinsipal sebagai orang yang mengatur orang lain dan agen adalah orang yang melaksanakan perintah dari seorang prinsipal.

Dalam sektor publik hubungan keagenan terjadi antara pihak eksekutif dengan legislatif, dimana eksekutif berperan sebagai agen dan legislatif sebagai prinsipal Halim, A., & Abdullah, S. (2010). Dalam hubungan ini, legislatif memberikan tanggung jawab pengelolaan pemerintahan kepada eksekutif. Dalam Keagenan selalu ada masalah antara prinsipal dan agen. Oleh karena itu, permasalahan yang sering muncul antara eksekutif dan legislatif merupakan permasalahan keagenan. Dalam entitas publik, teori keagenan secara sadar maupun tidak telah diterapkan dipemerintahan Indonesia. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi

Daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya secara mandiri, dan pemerintah pusat juga mengharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakatnya.

Peran pemerintah pusat bertindak sebagai prinsipal yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah bertindak sebagai agen untuk mengelola pemerintahannya secara mandiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah sebagai agen dituntut untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Sedangkan kenyataannya pemerintah daerah belum mampu menggali potensi sumber pendapatan daerah sehingga masih membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat.

Hubungan keagenan juga terjadi antara masyarakat dan legislatif. Legislatif merupakan Agen bagi masyarakat untuk mewakili kepentingan masyarakat di parlemen. Masyarakat sebagai *The Ultimate Prinsipal* Abdulah & Asmara (2006) mengharapkan legislatif dapat mengeluarkan kebijakan yang mengarah kepada kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, masyarakat sebagai prinsipal menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pemerintah daerah sebagai agen untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku. Masyarakat berhak untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah agar tercipta kemandirian keuangan daerah.

Menurut Pratiwi, N. (2016) ciri-ciri daerah yang memiliki tingkat kemandirian daerah yang tinggi yaitu: 1) Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah mempunyai kemampuan dan kekuasaan untuk menggali potensi sumber pendapatan, mengelola dan menggunakan dananya sendiri untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, 2) Pemerintah pusat semestinya hanya mengandalkan bantuan seminimal mungkin, oleh karena itu penerimaan fiskal daerah harus menjadi sumber penerimaan fiskal terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan fiskal pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Semakin tinggi tingkat kemandirian yang dicapai oleh suatu daerah maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut.

## **2. Kemandirian Keuangan Daerah**

Keuangan daerah merupakan segala hak dan kewajiban yang bisa dinilai dengan mata uang, demikian pula dengan segala sesuatu baik yang berupa uang atau barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah Halim, A. (2007). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemandirian keuangan daerah diartikan bahwa pemerintah dapat mengembangkan sendiri pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangannya dalam rangka prinsip desentralisasi, dan membangun pemerintahan daerah sendiri.

Menurut Halim, A. (2007) ruang lingkup keuangan daerah meliputi keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan daerah yang dikelola langsung adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan barang inventaris milik daerah sedangkan keuangan

daerah yang dipisahkan mencakup seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan daerah tersebut, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-Undang Otonomi Daerah memberikan konsekuensi bagi daerah dimana akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu dengan daerah lainnya, terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah, yaitu:

- a. Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah
- b. Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah
- c. Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah
- d. Daerah yang kurang mampu melaksanakan otonomi daerah

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber-sumber keuangan, mengelola serta menggunakan keuangan itu sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
- b. Tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi bagian sumber keuangan terbesar, serta didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Tangkilisan, H. (2007) berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, yaitu:

- a. Potensi ekonomi daerah, salah satu indikator yang banyak digunakan untuk mengukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB).
- b. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya kemampuan atau kinerja lembaga secara inovatif dan pemanfaatan lembaga Dispenda dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah secara terencana.

Berikut ini tabel pola hubungan tingkat kemandirian keuangan daerah:

**Tabel 2.1**  
**Pola hubungan tingkat kemandirian keuangan daerah.**

<b>Kemandirian (%)</b>	<b>Kemampuan</b>	<b>Hubungan</b>
0-25	Rendah Sekali	Instruktif
>25-50	Rendah	Konsultatif
>50-75	Sedang	Partisipatif
>75-100	Tinggi	Deligatif

Sumber: Halim, A. (2007)

Jika pola hubungan tingkat kemandirian keuangan daerah menurun, maka hal ini menunjukkan kemandirian keuangan daerah cenderung menurun walaupun PAD meningkat, karena peningkatannya lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan bantuan dan sumbangan. Semakin sedikit sumbangan dari pemerintahan pusat maka akan semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah

hal ini akan menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat.

Pola hubungan tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 1) Pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan, sehingga dapat diartikan daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah, 2) Pola hubungan konsultatif yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah berkurang, 3) Pola hubungan partisipatif dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang, 4) Pola hubungan delegatif yaitu daerah benar-benar dikatakan telah mampu mandiri karena campur tangan pemerintah pusat tidak ada Halim, A. (2013).

### **3. Ukuran Pemerintah Daerah**

Ukuran pemerintah daerah menggambarkan seberapa besar daerah tersebut dengan melihat total aset yang dimiliki oleh suatu daerah Pratiwi, N. (2016). Dalam pengukurannya ukuran pemerintah daerah diukur dengan melihat total aset dalam suatu periode tertentu. Gomes, R. C., Alfinito, S., & Albuquerque, P. H. M. (2013) mengatakan bahwa kota besar berkemungkinan besar dapat mengelola pendapatan dan belanja secara baik jika dibandingkan dengan kota kecil.

Hasi penelitian Kunchayono, H. (2015) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Dengan total aset yang besar pemerintah daerah dapat memperbaiki infrastruktur maupun sarana dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka diharapkan

semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan dari aset yang dimiliki.

#### **4. Umur Pemerintah Daerah**

Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012) menyebutkan bahwa umur pemerintah daerah adalah tahun dibentuknya suatu pemerintah daerah berdasarkan undang-undang pembentukan daerah tersebut. Menurut undang-undang No.23 Tahun 2014 pasal 1 mengatakan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan wilayah otonom.

Pasal 4 Undang-undang no.32 tahun 2004 menjelaskan bahwa Pembentukan wilayah ditentukan oleh hukum. Pembentukan suatu daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau membagi suatu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 lebih lanjut menyebutkan bahwa komposisi suatu daerah harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik daerah.

#### **5. Status Pemerintah Daerah**

Status pemerintah daerah merupakan suatu pengakuan nasional sebuah daerah sebagai suatu kabupaten atau kota. Kabupaten atau kota adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi. Secara umum,

baik kabupaten atau kota memiliki wewenang yang sama yaitu mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri.

Menurut UU No.22 Tahun 1999 kewenangan daerah adalah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan ini mencakup kewenangan di semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang masih berada ditangan pusat.

Kewenangan daerah yang terdapat di dalam undang-undang adalah:

- a. Mengelola sumber daya nasional yang tersedia di daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan
- b. Mengelola wilayah laut hingga 12 mil dari garis pantai hingga laut lepas dan berhak melakukan:
  - 1) Eksplorasi, pengembangan, konservasi dan pengelolaan sumber daya laut di wilayah tersebut.
  - 2) Pengaturan keperluan administratif.
  - 3) Pengaturan pengelolaan.
  - 4) Penegakan hukum.
  - 5) Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara
- c. Melakukan pengangkatan, mutasi, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan imbalan kerja, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,

- 1) Membiayai kegiatan operasional tugas pemerintah daerah dan DPRD
- 2) Melakukan pinjaman dari sumber dalam maupun luar negeri dengan persetujuan DPRD dan Pusat untuk pinjaman luar negeri
- 3) Menentukan tarif dari pemungutan retribusi dan pajak daerah.
- 4) Mendirikan Badan Usaha Milik Daerah
- 5) Menentukan APBD
- 6) Melakukan kerjasama antar daerah atau badan, dan membentuk Badan Kerjasama baik dengan mitra didalam maupun diluar negeri
- 7) Menetapkan tatakelola Kawasan Perkotaan
- 8) Pemerintahan kota/kabupaten yang berdekatan dapat membentuk kerjasama untuk mengelola kawasan perkotaan
- 9) Membentuk, menghapus, dan menggabungkan desa yang ada di wilayahnya atas usul dan persetujuan DPRD
- 10) Mengatur pengelolaan pemerintahan desa
- 11) Membentuk Satuan Polisi Pamong Praja

Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan peluang yang baik bagi para pengelola pemerintah daerah untuk menunjukkan pengabdianya kepada masyarakat, sekaligus menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk berbenah diri dalam proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, melalui desentralisasi dan pemekaran otonomi daerah, pemerintah akan menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, demokratis, ambisius, tanggap, terbuka, dan bertanggung jawab di daerah yang melayani masyarakat.

## **6. Jumlah Penduduk**

Penduduk adalah warga negara Indonesia atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia undang-undang dasar 1945 pasal 6 ayat 2. Menurut Chairany, M. (2010) penduduk merupakan orang yang telah tinggal di wilayah demografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau telah tinggal kurang dari enam bulan tetapi bermaksud untuk tinggal. Penduduk disuatu daerah tentunya memiliki peran yang berbeda-beda. Penduduk bisa menjadi konsumen dan produsen.

Jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah daerah dan memiliki mata pencaharian tetap di daerah itu serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Pencatatan atau peng-kategorian seseorang sebagai penduduk biasanya berdasarkan usia yang telah ditetapkan. Semakin besar populasi penduduk berarti tingkat permintaan dan penawaran akan meningkat dan menguntungkan banyak pihak dengan kata lain semakin besar jumlah penduduk juga akan meningkatkan perekonomian suatu daerah.

## **7. Jumlah SKPD**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh kepala satuan kerja selaku pengguna anggaran/pengguna barang. contohnya: SKPD dinas kesehatan, SKPD dinas pendidikan, SKPD dinas pemuda dan olahraga, dan lain sebagainya. SKPD adalah pelaksanaan fungsi eksekutif yang harus

berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik (Undang-undang No.32 pasal 120 Tahun 2004).

Satu atau lebih SKPD mencakup semua aspek pengelolaan pembangunan daerah, aspek-aspek tersebut meliputi:

- a. Pengambilan keputusan dan koordinasi dilakukan dalam bentuk sekretariat
- b. Pengawasan di tempatkan dalam bentuk inspektur
- c. Perencanaan dimasukkan dalam formulir utama
- d. Seluruh aspek unsur pendukung dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah tertentu masuk dalam kelembagaan teknis daerah
- e. Kantor wilayah bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan daerah

## **8. Belanja Pegawai**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN, menjelaskan bahwa belanja pegawai adalah belanja pemerintah pusat dan digunakan untuk membayar pegawai pemerintah pusat, pensiunan, Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian negara dan pejabat negara, baik yang menjalankan tugas di dalam maupun di luar negeri, digunakan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang telah selesai, kecuali untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja pegawai sendiri juga memiliki kegunaan yang amat luas jangkauannya, adapun kegunaan dari belanja pegawai meliputi:

- a. Gaji dan tunjangan
- b. Honorrarium

- c. Vakasi
- d. Lembur
- e. Kontribusi sosial

## **9. *Leverage***

Rasio *leverage* Ini adalah rasio total hutang dalam perusahaan terhadap rata-rata ekuitas. *Leverage* menggambarkan struktur modal suatu perusahaan, sehingga dapat dilihat seberapa besar kewajiban yang tidak bisa dibayarkan oleh perusahaan. *Leverage* adalah hasil penggunaan dana biaya tetap untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham Ridwan., & B.(2005).

Bagi perusahaan *leverage* bertujuan untuk meningkatkan laba kepada pemegang saham biasa, meskipun hal ini akan meningkatkan risiko bisnis dan risiko keuangan. Perubahan *leverage* akan menyebabkan perubahan pada tingkat pengembalian risiko, jika *leverage* meningkat maka tingkat pengembalian dan risiko juga akan meningkat. Pada sektor publik, khususnya pemerintah daerah, rasio *leverage* merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang jangka panjang, dan rasio *leverage* adalah rasio utang terhadap dana ekuitas (kekayaan bersih pemerintah daerah). Semakin besar hutang yang dimiliki oleh suatu daerah, semakin rendah kemandirian finansial pemerintah daerah tersebut. Pemerintah daerah dengan *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kemandirian finansial yang rendah karena sumber pendanaan utamanya berasal dari pihak luar. Sedangkan sebaliknya jika suatu daerah dapat menggunakan dana ekuitasnya untuk menutupi hutangnya, itu berarti hutang entitas dapat diminimalisir, sehingga

dapat menaikkan tingkat kemandirian daerah dengan tidak terbebannya daerah dengan sumber pendapatan dana dari pihak eksternal berupa pinjaman atau utang.

## **B. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu**

Berikut ini penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah:

1. Penelitian Imawan, R., & Wahyudin, A. (2014) mengenai Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012. Berdasarkan hasil penelitian ini, Ukuran pemerintah Daerah berpengaruh Positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Penelitian Kunchayono, H. (2015) mengenai Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Di Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian ini, *Size*, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai dan Status Pemda berpengaruh Positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, tetapi Umur Pemda berpengaruh Negatif Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
3. Penelitian Darwis, E. T. R. (2015) mengenai Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Hasil penelitian ini, Belanja Pegawai berpengaruh Positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
4. Penelitian Purnama, W. A. (2016) mengenai Pengaruh Komponen *Pad*, *Leverage* dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan

- Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil penelitian ini, *Leverage* memiliki berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
5. Penelitian Pratiwi, N. (2016) mengenai Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kemandirian Keuangan serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
  6. Penelitian Firmansyah, I. (2017) mengenai Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2011-2015. Berdasarkan hasil penelitian ini, *Leverage* dan *Size* berpengaruh Positif terhadap Kemandirian Kemandirian Keuangan Daerah.
  7. Penelitian ANWAR, D. K. (2019) mengenai Determinan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2017. Berdasarkan hasil penelitian ini, Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

### **C. Hubungan Antar Variabel**

#### **1. Ukuran Pemerintah Daerah**

Ukuran daerah menggambarkan seberapa besar daerah tersebut dengan melihat total sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah atau asetnya. Ukuran pemerintah daerah diukur dengan melihat total aset dalam satu periode tertentu. Gomes, R. C., Alfinito, S., & Albuquerque, P. H. M. (2013) menjelaskan bahwa kota besar lebih mungkin untuk mengelola pendapatan dan belanja lebih baik

daripada kota kecil. Menurut penelitian Kuncahyono, H. (2015) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah. Kabupaten/ Kota dengan total aset yang lebih besar akan lebih kompleks dalam menjaga dan mengelola asetnya sehingga pemerintah daerah perlu mengungkapkan lebih lanjut tentang aset yang dimiliki pemeliharaan dan pengelolaannya dengan lebih baik. Pratiwi, N. (2016) juga melakukan penelitian mengenai ukuran pemerintah daerah terhadap kemandirian keuangan daerah, hasilnya menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Semakin besar ukuran pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kedepannya melalui dukungan dari aset yang ada, sehingga kinerja pemerintah daerah juga akan meningkat dikarenakan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki pemerintah memadai. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

**H1:** Ukuran Pemerintahan Daerah Berpengaruh Positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

## **2. Umur Pemerintah Daerah**

Umur pemerintahan daerah adalah tahun terbentuknya pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh daerah yang bersangkutan. Umur pemerintahan daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib pada Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD). Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, N. (2016)

menunjukkan bahwa umur pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Semakin lama atau semakin tua suatu pemerintah daerah berarti pemerintahan daerah tersebut sudah memiliki banyak pengalaman dalam mengelola daerahnya. Pengalaman yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah daerah menjalankan sistem administrasinya yang terdiri dari pencatatan dan pelaporan keuangan. Semakin berpengalaman suatu pemerintah daerah diharapkan proses administrasi tersebut bisa berjalan secara efektif dan efisien sehingga secara langsung akan berpengaruh pada peningkatan suatu daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

**H2:** Umur Pemerintah Daerah Berpengaruh Positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

### **3. Status Pemerintah Daerah**

Status pemerintah daerah adalah wilayah yang diakui secara nasional sebagai kabupaten atau kota. Kabupaten atau kota adalah bagian administratif setelah provinsi Indonesia. Secara umum, daerah dan kota memiliki kewenangan yang sama, yaitu mengatur dan menjalankan pemerintahannya sendiri. Pada penelitian ini status daerah digunakan untuk membedakan antara Kota dan Kabupaten.

Penelitian Kuncahyono, H. (2015) Menunjukkan bahwa status pemerintah daerah berdampak positif terhadap kemandirian keuangan daerah, selanjutnya pada penelitian Pratiwi, N. (2016) juga menyatakan bahwa status pemerintah daerah berdampak positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Pemerintah

kota pada umumnya memiliki sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia yang lebih baik dari pemerintah kabupaten, sedangkan daerah yang sudah lama berdiri akan lebih mandiri dalam hal ekonomi dibandingkan daerah yang baru pemekaran. Semakin memadai sumber daya yang ada maka meningkatkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih baik. Kinerja pemerintah yang memadai tentunya akan meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

**H3:** Status Pemerintah Daerah Berpengaruh Positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

#### **4. Jumlah Penduduk**

Penduduk adalah warga negara dan orang asing yang bertempat tinggal di suatu negara. Menurut Chairany, M. (2010) penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Penduduk di suatu daerah tentunya memiliki peran yang berbeda-beda. Penduduk bisa menjadi konsumen dan produsen. Semakin besar populasi penduduk akan meningkatkan permintaan dan penawaran sehingga menguntungkan banyak pihak, dengan demikian semakin besar jumlah penduduk akan berimplikasi pada peningkatan berbagai macam kegiatan ekonomi disuatu wilayah.

Melalui kegiatan ekonomi tersebut maka akan meningkatkan pungutan yang akan masuk ke dalam kas daerah seperti pajak maupun retribusi daerah. Pajak dan

retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang mendukung terciptanya kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

**H4:** Jumlah Penduduk Berpengaruh Positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

## **5. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempresentasikan diferensiasi fungsional dipemerintah Indonesia. SKPD bertugas untuk menjalankan fungsi eksekutif dan berkoordinasi untuk memastikan tata kelola yang baik. SKPD merupakan instansi daerah yang ada di lingkungan pemerintah daerah dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi keuangan daerah, khususnya kewenangan penggunaan anggaran / komoditas daerah. Penggunaan APBD / komoditas adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan tanggung jawab dan kewenangan SKPD, sehingga semakin banyak jumlah SKPD maka dapat diharapkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan kinerja pemerintah daerah juga semakin baik. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tugas SKPD yaitu penyusunan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan belanja, pelaksanaan dan penataan pendapatan, akuntansi dan pelaporan sampai kepada perubahan APBD.

Penelitian Kunchayono, H. (2015) menunjukkan bahwa jumlah SKPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan. Hasil penelitian Pratiwi, N. (2016) menyatakan bahwa jumlah SKPD berpengaruh

positif terhadap kemandirian keuangam daerah. Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

**H5:** Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Berpengaruh Positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

## **6. Belanja Pegawai**

Belanja pegawai adalah pengeluaran kompensasi dalam bentuk uang dan barang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pegawai pemerintah, pegawai negeri (PNS), dan pegawai yang bekerja yang belum menjabat sebagai pegawai negeri berupa kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan, namun tidak berlaku pada pekerjaan yang berhubungan dengan pembentukan modal (Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja). Belanja Pegawai termasuk dalam belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik yang merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik.

Kelompok belanja ini meliputi: 1) Belanja pegawai, pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/ personal yang berhubungan langsung dengan aktivitas, 2) Belanja barang, merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, 3) Belanja perjalanan, merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, 4) Belanja pemeliharaan, merupakan pemeliharaan Pemerintah Daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik.

Dari pernyataan di atas dapat diasumsikan bahwa semakin besar komposisi belanja pegawai semakin besar belanja operasi dan pemeliharaan sarana publik. Yang berarti kinerja Pemerintah Daerah akan semakin baik. Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

**H6:** Belanja Pegawai Berpengaruh Positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

### 7. *Leverage*

Kata *leverage* lebih sering digunakan pada sektor swasta. *Leverage* menunjukkan utang yang dimiliki oleh perusahaan. Bagi perusahaan komersial atau swasta, rasio *leverage* biasanya digunakan untuk mengukur rasio antara dana yang disediakan oleh pemilik dan dana yang dipinjam perusahaan dari kreditor, Halim, A. (2007). Pada sektor publik, khususnya entitas pemerintah daerah, rasio *leverage* digunakan untuk mengukur rasio hutang terhadap ekuitas (aset bersih pemerintah daerah). Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah, I. (2017) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Tingkat *leverage* berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Lampung, dimana pemerintah di Provinsi Lampung mampu menggunakan sumber-sumber pinjaman dari luar untuk mengurus pemerintahan daerahnya secara efektif, sehingga meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Dapat diasumsikan bahwa jika suatu daerah dapat meningkatkan *leverage* dengan menggunakan dana ekuitasnya untuk menutupi kewajiban, hal itu

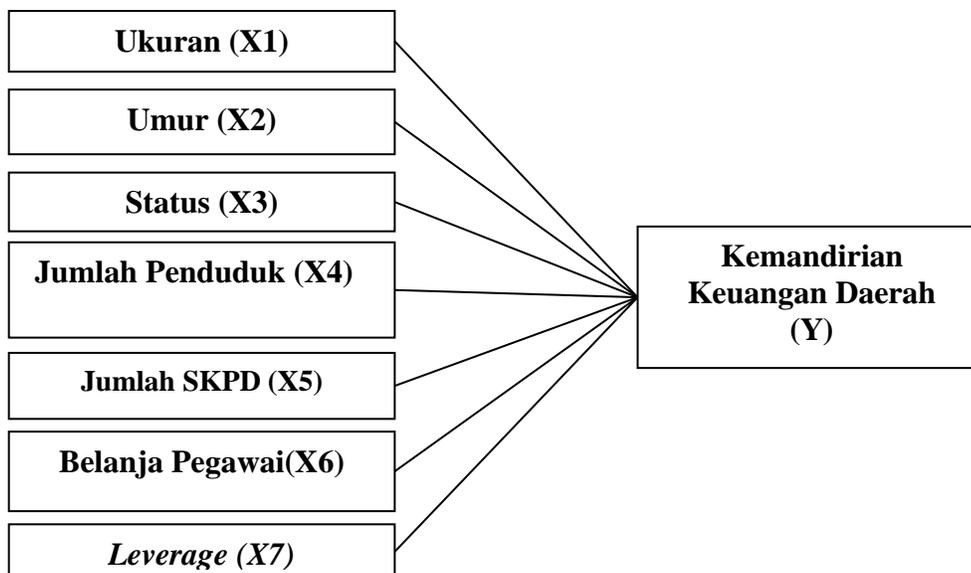
berarti kewajiban entitas dapat diminimalisir, sehingga dapat menaikkan tingkat kemandirian daerah dengan tidak terbebani daerah oleh sumber pendapatan dana dari pihak eksternal berupa pinjaman atau utang.. Berdasarkan dari uraian diatas, maka dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

**H7:** *Leverage* Berpengaruh Positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

### C. Kerangka Konseptual

Menurut penelitian teoritis dan hubungan antar variabel yang telah dijelaskan oleh penulis diatas maka kerangka konseptual yang dapat diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka konseptual**



#### **D. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan dari kerangka konseptual yang telah di jelaskan sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan sebagai berikut:

- H1:** Ukuran Pemerintah Daerah Berdampak Positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
- H2:** Umur Pemerintah Daerah Berdampak Positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
- H3:** Status Pemerintah Daerah Berdampak Positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
- H4:** Jumlah Penduduk Berdampak Positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
- H5:** Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Berdampak Positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
- H6:** Belanja Pegawai Berdampak Positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
- H7:** *Leverage* Berdampak Positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka besar pengaruh yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dilihat dari nilai Adjusted R Square pengaruh x1 sampai x7 secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah senilai 0.113. Maknanya, pengaruh x1 sampai x7 secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah adalah sebesar 11.3%, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
2. Umur pemerintah daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
3. Status pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
4. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
5. Jumlah SKPD berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
6. Belanja pegawai berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
7. *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan

Daerah

## **B. KETERBATASAN PENELITIAN**

Penelitian ini telah dirancang dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, namun peneliti menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Nilai *adjusted R2* adalah 11.3% yang berarti kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen hanya 11.3%. Sehingga masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.
2. Penelitian ini hanya dilakukan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat dari periode waktu 2015-2019, dan ini menyebabkan hasil penelitian akan berbeda jika dilakukan di daerah lain mengingat perbedaan karakteristik masing-masing wilayah di Indonesia.

## **C. SARAN**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan faktor yang bisa meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah, supaya kemandirian keuangan pemerintah daerah bisa lebih ditingkatkan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh kemandirian keuangan daerah. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan sumber data yang digunakan maupun jangka waktu penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan akurat.

3. Bagi pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat agar lebih optimal dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang ada, guna meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Sehingga dapat meminimalkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2004, October). Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: Pendekatan Principal-Agent Theory. In *Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Bengkulu, Bengkulu* (pp. 4-5).
- Abdullah, S., & Asmara, J. A. (2006). Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah. *Simposium Nasional Akuntansi, 9*, 23-26.
- Anwar, D. K. (2019). Determinan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2017.
- Chairany, M. (2010). Analisis Total Penduduk Kecamatan Padang Bolak Pada Tahun 2012”(Tugas Akhir). *Medan: Universitas Sumatera Utara*.
- Darwis, E. T. R. (2015). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi, 3*(1).
- Firmansyah, I. (2017). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011–2015.
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM dan SPSS. *Semarang: BP Universitas Diponegoro*.
- Gomes, R. C., Alfinito, S., & Albuquerque, P. H. M. (2013). Analyzing local government financial performance: evidence from Brazilian municipalities 2005-2008. *Revista de Administração Contemporânea, 17*(6), 704-719.
- Groves, S. M., W.M. Godsey, dan M.A. Shulman. (2001). Financial Indicator for Local Government. *Public Finance International City Management Association 9*: 243-255.

- Hadi, D. A., & Setiawan, M. A. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengungkapan Internet Budgeting Reporting. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 2(1), 2099-2114.
- Hadi, W. (2010). Pengaruh likuiditas dan leverage terhadap kemandirian daerah (studi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2007 di wilayah Provinsi Aceh). *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 3(1), 29-51.
- Halim, A. (2007). *Manajemen Keuangan Bisnis*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Halim, A. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah (ed. 3) Koran*. Penerbit Salemba.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2010). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 53-64.
- Imawan, R., & Wahyudin, A. (2014). Analisis kemandirian keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2010-2012. *Accounting Analysis Journal*, 3(2).
- Kuncahyono, H. (2015). *Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kemandirian keuangan pada pemerintah daerah di Jawa Timur* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Martono, N. (2015). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Minarsih, R. A. (2015). *Pengaruh size, wealth, leverage dan intergovernmental revenue terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di jawa tengah* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG).
- Mukarramah, H. (2017). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Lima Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2014* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

- Nahartyo, E., & Utami, I. (2019). *Panduan Praktis Riset Eksperimen*. Jakarta Barat: Penerbit Indeks Jakarta.
- Patrick, P. A. (2007). *The determinants of organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government* (Doctoral dissertation, Pennsylvania State University).
- Pratiwi, N. (2016). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kemandirian Keuangan serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia* (Doctoral dissertation, STIE YKPN).
- Purnama, W. A. (2016). Pengaruh Komponen PAD, Leverage, dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota. di Provinsi Lampung).
- Putri, E. R. (2014). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2008-2012)* (Doctoral dissertation, Universitas Lampung).
- Santoso, A. (2017). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Jawa Dan Bali Tahun 2015)* (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154-170.
- Simatupang, F. F. (2016). Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tangkilisan, H. (2007). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.

Taryoko, (2016) “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2006-2013*”. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Utami, B. (2018). *Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).

Wahyuni, E., & Ardini, L. (2018). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(6).

Waliyyani, G. M., & Makhmud, A. (2015). Pengaruh karakteristik pemerintah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 4(2).